

ANALISIS KUASA PADA PRAKTIK KELEMBAGAAN PA'TOTIBOYONGAN DI MAMASA

Risma Junita

Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Alamat Email: rismajunita_kpm44@yahoo.com

Abstract

This paper elaborates the issue of agricultural resources management processes based on local institution called pa'totiboyongan in the Village of Ballatumuka, Mamasa. This research employs a power analysis framework to analyze the management processes in distributing agricultural resources. In a practical level, the agricultural resource management processes have involved various actors who have different roles and interests. These different roles and interests reveal the patterns of power relations among the actors in forms of conflict, resistance, persuasion, and collaboration. Furthermore, the influence of power relations among the actors on preserving the existence of pa'totiboyongan is clearly apparent. The result shows that the agricultural resources management processes are based on three important aspects: economics, ecological, and social-culture of society.

Keyword: Institution, Pa'totiboyongan, Agricultural Resources Management, and Power Relation

Intisari

Tulisan ini hendak menelaah mengenai pengelolaan sumberdaya pertanian berbasis kelembagaan lokal pa'totiboyongan di Desa Ballatumuka, Mamasa, dengan menggunakan kerangka analisis kuasa. Pada praktiknya, pengelolaan sumberdaya pertanian melibatkan beragam aktor yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Perbedaan peran dan kepentingan tersebut akan melahirkan pola-pola relasi kuasa berbentuk konflik,

perlawanan, persuasi, maupun kolaborasi. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang pengaruh relasi kuasa antar aktor terhadap praktik dan eksistensi kelembagaan pa'totiboyongan. Untuk memahami hal tersebut, maka tulisan ini diawali dengantelaah mendalam mengenai peran dan kepentingan masing-masing aktor dalam praktik pa'totiboyongan. Telaah lebih dalam tentang pola relasi kuasa seperti apa yang mewarnai praktik kelembagaan pa'totiboyongan dan pengaruhnya terhadap eksistensi kelembagaan tersebut disajikan di akhir tulisan ini.

Kata Kunci: Kelembagaan, Pa'totiboyongan, Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, dan Relasi Kuasa

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah, dan dikenal pula sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua setelah Brazil¹. Diantara sumberdaya alam yang tersedia di Indonesia, sumberdaya pertanian dan kegiatan berupa pengelolaan sumberdaya tersebut masih berada pada skala prioritas utama. Hal ini mengingat bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia, terlihat dari besarnya tenaga kerja yang terserap di sektor ini². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002, sektor pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44.3 persen penduduk. Peran penting sektor pertanian tidak hanya menyangkut posisinya sebagai penyedia pangan utama, tetapi juga menyangkut fakta bahwa ternyata masih banyak penduduk di negeri ini yang kehidupannya secara struktural maupun kultural bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, sektor pertanian juga berperan penting pada pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa negara, pemenuhan kebutuhan pangan, maupun penyerapan tenaga kerja³.

Salah satu wilayah di Indonesia yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian adalah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kabupaten yang masih tergolong sebagai kabupaten

1 Hitipeuw J, *Indonesian The World's Second Mega Biodiversity Country*. (KOMPAS.com, 2011)

2 Herliana L, *Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Dekomposisi Sistem Neraca Sosial Ekonomi* [tesis]. (Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2014)

3 Fauzi M, *Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia: Analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi* [disertasi], (Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2008)

baru ini, berpeluang melahirkan kebijakan daerah tentang kedaulatan pangan⁴, yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini, orang-orang di daerah Mamasa, yang berpenduduk sekitar seratus ribu jiwa pada tahun 2000, mencari nafkah dengan menanam padi, tanaman hortikultura, dan kopi. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Mamasa adalah 27.431 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan hasil sensus pada tahun 2003, maka jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5.677 rumah tangga. Wilayah Kabupaten Mamasa yang secara geografis berada di dataran tinggi dengan suhu yang dingin, menjadikan masyarakat Mamasa menggantungkan aktivitas ekonominya pada usaha pertanian. Bagi masyarakat Mamasa, lahan merupakan hal penting dalam usaha pertanian mereka, terutama lahan basah atau sawah. Lahan basah ditempatkan sebagai aset penting dibandingkan lahan kering, baik dilihat dari dimensi ekonomi maupun sosial. Betapa pentingnya pengelolaan lahan basah yang dianggap sebagai kegiatan pertanian utama masyarakat Mamasa juga terlihat dari adanya ritual-ritual atau tradisi-tradisi khusus di dalamnya. Indikasi bahwa tradisi-tradisi lama telah bertahan di Mamasa lebih lama dapat ditemukan dalam cara menanam sawah⁵.

Sumberdaya pertanian yang potensial disertai aspek sosial-budaya yang masih kaya akan nilai-nilai lokal, menjadikan wilayah Mamasa sebagai wilayah yang 'menarik' untuk dikaji. Di dalam pengelolaan sumberdaya pertanian, khususnya lahan atau *litak* basah (sawah), ditemukan desa-desa di Mamasa yang masih menjaga dan melaksanakan kearifan lokal dari para leluhur berkaitan dengan proses produksi pertanian. Kearifan lokal tersebut tercermin dari adanya kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pertanian, yang dikenal dengan istilah *pa'totiboyongan*. *Pa'totiboyongan* adalah istilah lain dari rangkaian proses pengerjaan *litak* basah atau sawah bagi Orang Mamasa⁶. Hingga saat ini, aturan tersebut masih berlaku dan dijalankan di Mamasa. Dalam praktik atau pelaksanaan *pa'totiboyongan*, terdapat aktor-aktor yang masing-masing memiliki kuasa untuk mengatur dinamika seperti apa yang akan terjadi pada praktik tersebut. Faktanya, di beberapa desa atau kelurahan di Mamasa, praktik *pa'totiboyongan* sudah tidak lagi dijalankan 'seakurat' seperti

4 Sjaf S, Asma L, Retno PA, *Potret Kedaulatan Pangan Mamasa*. (Bogor, SAINS, 2007)

5 Buijs K, *Kuasa Berkat dari Belantara dan Langit: Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat*. (Jakarta, Penerbit Ininnawa dan KITLV, 2009)

6 Sjaf S, Asma L, Retno PA, *Op.Cit.*, hlm. 85

ajaran nenek moyang terdahulu, dan bertransformasi menjadi sebatas simbol warisan budaya. Sementara itu, di beberapa desa lainnya praktik *pa'totiboyongan* masih dilaksanakan sesuai ajaran nenek moyang, dan keberadaan atau eksistensinya masih kuat hingga saat ini.

Sumberdaya pertanian merupakan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologi. Penguasaan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologi, melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda⁷. Begitu pula yang terjadi pada rangkaian pelaksanaan praktik *pa'totiboyongan*, atau praktik pengelolaan sumber daya pertanian padi sawah, dimana terdapat aktor-aktor yang masing-masing memiliki peran dan kuasa dengan kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut mempengaruhi hubungan atau relasi antar pihak yang bisa melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi⁸. Salah satu wilayah yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal melalui praktik *pa'totiboyongan*, adalah Desa Ballatumuka, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa. Oleh karena masih dipegang teguhnya nilai-nilai kearifan lokal dan berbagai aturan adat lainnya, maka desa ini disebut juga sebagai Desa Adat Ballatumuka. Di Desa Ballatumuka sendiri, pemimpin pelaksanaan *pa'totiboyongan* disebut *so'bok*. Selain aktor yang secara struktur adat memegang peran dan kuasa penting dalam praktik *pa'totiboyongan*, aktor lainnya yang juga berperan penting adalah pemerintah desa (dalam hal ini kepala desa) dan majelis gereja. Masing-masing aktor memiliki peran tersendiri dalam pelaksanaan praktik *pa'totiboyongan*. Masuknya lembaga formal seperti pemerintahan desa dengan kepala desa dan perangkat-perangkat desa lainnya, serta masuknya ajaran agama melalui pendeta-pendeta dalam majelis gereja menjadikan kelembagaan *pa'totiboyongan* 'seolah' dikendalikan oleh tiga aktor dengan kepentingan dan kuasa yang berbeda. *So'bok* pada akhirnya harus menyesuaikan diri dengan 'kehadiran' aktor formal seperti kepala desa dan majelis gereja. Berdasarkan latar belakang dan fakta tersebut, maka pertanyaan mendasar dari penelitian ini adalah, "bagaimana pengaruh relasi kuasa antar aktor terhadap praktik dan eksistensi kelembagaan *pa'totiboyongan*?" Untuk memahami hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran dan kepentingan masing-masing aktor dalam praktik *pa'totiboyongan*, serta menelisik lebih dalam pola relasi kuasa seperti apa yang mewarnai praktik kelembagaan *pa'totiboyongan* dan pengaruhnya

7 Maring P, *Bagaimana Kekuasaan Bekerja Dibalik Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi? Sebuah Sudut Pandang Antropologi tentang Perebutan Sumberdaya Ekologi*, (Jakarta, Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia, 2010)

8 *Ibid*, hlm 10

terhadap eksistensi kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka.

Studi ini didasarkan pada hasil penelitian lapang yang dilaksanakan di Desa Ballatumuka, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), dan didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya karena Desa Ballatumuka merupakan salah satu wilayah desa di Kabupaten Mamasa yang masih memegang teguh nilai-nilai serta aturan adatnya. Selain itu, di desa ini juga merupakan wilayah yang di dalamnya masih terdapat kelembagaan lokal yang mengatur pengelolaan sumberdaya pertanian, yaitu *pa'totiboyongan*. Kelembagaan lokal inilah yang sampai saat ini mengatur jalannya semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pertanian di lahan basah atau sawah dengan komoditas utama padi. Penelitian di lapangan dilaksanakan pada Agustus tahun 2014 sampai dengan akhir Oktober tahun 2014.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang didukung oleh data-data kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian dimana data yang digunakan merupakan data kualitatif dengan pengungkapan fakta secara deskriptif naratif⁹. Selain itu, data-data kuantitatif juga dikumpulkan sebagai data pendukung. Data primer-kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu wawancara dan observasi (pengamatan). Gabungan hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sejak tahap awal penelitian dengan merunut pada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, pengkajian data, dan penarikan kesimpulan.

Ballatumuka sebagai Sebuah Lokasi Studi

Desa Ballatumuka merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Menurut asal katanya, *Balla* berarti kawasan atau tanah, sedangkan *tumuka* berarti mendaki atau menanjak. Ballatumuka berarti "kawasan atau tanah yang menanjak atau mendaki". Arti tersebut sesuai dengan kondisi wilayah Ballatumuka yang didominasi oleh daratan berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan yang terjal. Ballatumuka adalah desa dengan jarak terjauh dari kota kecamatan, yaitu 12 km, dan berjarak sekitar 17 km dari ibukota Kabupaten Mamasa. Secara geografis, luas wilayah keseluruhan Desa Ballatumuka adalah 775 Ha dengan kondisi topografi yang dikenal sebagai daerah miring dan bergelombang. Kondisi topografi seperti ini menjadikan Desa Ballatumuka sebagai

9 Muljono P, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bogor, IPB Press, 2012)

salah satu wilayah yang cukup sulit diakses. Selain karena jaraknya paling jauh dari kota kecamatan, kondisi jalan yang berbukit-bergelombang juga menjadi penyebabnya.

Wilayah Ballatumuka terletak di atas ketinggian antara 1300 mdpl-2000 mdpl, dan berbatasan dengan (a) Desa Ulumambi, Kecamatan Bambang di sebelah utara, (b) Desa Pidara di sebelah timur, (c) Desa Pambe di sebelah selatan, dan (d) Desa Porondo Bulawan di sebelah barat. Dalam kesatuan wilayah Ballatumuka, terdapat lima dusun, yaitu Dusun Ballapeu', Dusun Bamba Pongko, Dusun Gallangrapa', Dusun Rante Masanda, dan Dusun Rantepuang. Diantara lima dusun tersebut, Dusun Rantepuang adalah dusun yang paling sulit diakses. Hal ini karena letak dusun tersebut yang berjauhan dari dusun-dusun lainnya. Sebagai informasi tambahan, Dusun Rantepuang dapat dikatakan terletak di balik salah satu perbukitan di Ballatumuka (yaitu: Bukit Buntumusa). Sulitnya akses menuju Dusun Rantepuang ditunjukkan dengan tidak adanya kendaraan yang dapat digunakan untuk menjangkau dusun tersebut, walaupun hanya sepeda motor. Untuk dapat tiba di Dusun Rantepuang, kendaraan seperti sepeda motor hanya bisa sampai di dusun sebelumnya, dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 30 menit. Kesulitan akses ini pula yang menyebabkan para penduduk di dusun tersebut sangat jarang keluar meninggalkan dusunnya, bahkan untuk kepentingan pendidikan seperti bersekolah. Tidak heran, jumlah penduduk di Dusun Rantepuang adalah yang paling sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di dusun-dusun lainnya di Ballatumuka.

***Pa'totiboyongan* sebagai Kelembagaan Adat Pengatur Tata Kelola Sumberdaya Pertanian**

Istilah *pa'totiboyongan* merupakan istilah lokal yang sama maknanya dengan pertanian atau tentang penanaman padi. *Pa'totiboyongan* disimbolkan dengan *karurung* (batang pohon palem) sebagai alat pengolah tanah pada masa dahulu. Pelaksanaan *pa'totiboyongan* di Mamasa pada umumnya, dan di Ballatumuka (secara khusus), dipimpin oleh seorang *perangkat hadat* di bidang pertanian yang disebut *so'bok*. Secara umum, *so'bok* bertugas untuk memimpin pelaksanaan ritual-ritual dalam penanaman padi, termasuk menentukan dan memberikan 'isyarat' kepada masyarakat luas kapan waktu yang tepat untuk mulai menebar benih padi. Tugas *so'bok* tidak hanya menekankan ketaatan terhadap ritual-ritual penanaman padi, namun juga memainkan peran aktif di dalamnya¹⁰.

¹⁰ Buijs K, *Op.Cit.*, hlm. 142

Sosol *so'bok* adalah seorang petugas yang mengatur rangkaian proses pengerjaan sawah atau pemimpin bagi masyarakat dalam menggarap sawah. Dengan kata lain, seorang *so'bok* adalah seorang sosok yang mengawal serta mendampingi proses pelaksanaan *pa'totiboyongan*. Secara garis besar, tugas dari seorang *so'bok* adalah sebagai berikut: 1). Memimpin masyarakat untuk turun ke sawah; 2). Melakukan ritual membaca tanda-tanda alam sebelum masa tanam tiba; 3). Memimpin melakukan *pa'bulanliangan*, yaitu kegiatan membersihkan kubur atau makam para orangtua; 4). Memimpin masyarakat bergotong royong untuk membersihkan saluran air atau *mepalempang*; 5). Menyerukan masyarakat untuk menjaga perilaku dan sikap dari perbuatan-perbuatan dosa; dan 6). Memimpin rapat untuk memutuskan kapan dilakukannya syukuran atas hasil panen. Dari beberapa tugas *so'bok* tersebut, pada dasarnya tugas pokok seorang *so'bok* adalah mengawal, mendampingi, serta memimpin berjalannya rangkaian proses pengerjaan *litak* basah atau sawah (*pa'totiboyongan*) yang dilakukan oleh masyarakat selama satu tahun penuh.

Ada beberapa ragam kegiatan atau aktivitas dalam praktik *pa'totiboyongan* di Mamasa. Pada masing-masing tempat atau wilayah biasanya memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Biasanya, urutan-urutan serta istilah-istilah lokal untuk aktivitas dalam *pa'totiboyongan* di masing-masing desa memiliki perbedaan tersendiri. Secara umum, *pa'totiboyongan* berisi langkah-langkah dalam bercocok tanam padi sawah. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam aturan adat masyarakat Ballatumuka terkait dengan praktik *pa'totiboyongan*.

1. *Mepalempang*, artinya perbaikan saluran irigasi sebelum turun sawah usai *bulan liang* (bulan dimana dilakukannya perbersihan kubur atau makam para orangtua). Kegiatan atau aktivitas pembersihan serta perbaikan saluran irigasi dilakukan setelah perbersihan kubur para orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama atau bergotong royong oleh masyarakat.
2. *Mantossok*, artinya pembukaan tanah pertama kali oleh *so'bok* sebagai komando, sekaligus menghambur benih untuk pertama kalinya. Setelah *so'bok* melakukan hal ini, maka masyarakat umum akan mengikutinya secara serempak. Kegiatan ini diawali dengan ritual do'a. Jika pada masa dahulu (sebelum dikenalnya ajaran agama di Mamasa), ritual awalan ini dilakukan lengkap dengan sesajian, maka saat ini ritual tersebut digantik dengan melakukan do'a bersama di gereja dengan masing-masing masyarakat anggota jemaat membawa derma

- pembukaan tanah atau hamburan benih.
3. *Tumorak*, artinya pembersihan dan penyiangan padi, dan pengaturan jarak tanam padi. Pada saat tumorak, muda-mudi dapat melakukan *io iodan siburak*, yaitu semacam permainan yang dilakukan di sawah berupa nyanyian dengan nada-nada panjang berirama khusus.
 4. *Tammu bulung*, yaitu ritual khusus yang dilaksanakan di atas puncak suatu bukit setiap tiga tahun sekali. Di Ballatumuka, *tammu bulung* dilaksanakan di Bukit *Pa'pararukan* bagian utara dari semua gereja yang ada di wilayah desa Ballatumuka dengan sejumlah atraksi budaya menurut adat.
 5. *Mampoak*, yaitu ritual berupa kegiatan memakan buah padi pertama. Artinya setiap keluarga di Ballatumuka melakukan makan bersama buah padi pertama.
 6. *Mepare*, artinya panen sesuai kondisi masing-masing.
 7. Pesta panen, yang dilakukan di gereja masing-masing. Pesta panen terjadwal atas koordinasi yang disusun oleh kepala desa, pemangku adat, dan majelis gereja. Pada saat pesta panen tiba, maka masyarakat diharuskan membuat nasi bambu serta diwajibkan membawa derma persembahan atau derma pembangunan. Seluruh derma yang terkumpul nantinya akan dibagi oleh majelis gereja dengan perbandingan 3% untuk ketua hadat, dan 2% untuk perangkatnya.

Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Praktik *Pa'totiboyongan* di Ballatumuka

Praktik *pa'totiboyongan* di Ballatumuka dijalankan dengan keterlibatan berbagai aktor. Aktor-aktor tersebut memiliki peran dan kepentingan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Terdapat dua aktor utama yang berperan penting dalam praktik *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, yaitu: aktor internal dan aktor eksternal. Aktor internal yang dimaksud adalah aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan praktik *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, sedangkan aktor eksternal yang dimaksud adalah aktor-aktor yang keterlibatannya dalam pelaksanaan praktik *pa'totiboyongan* tidak secara langsung tetapi peran dan kepentingannya berpengaruh terhadap dinamika kelembagaan *pa'totiboyongan*. Aktor-aktor internal tersebut antara lain: masyarakat lokal Ballatumuka, *so'bok* sebagai imam padi atau pemimpin pelaksanaan *pa'totiboyongan*, Kepala Desa Ballatumuka beserta aparat

pemerintahan desa lainnya, serta majelis gereja sebagai perwakilan dari kelembagaan agama. Sementara itu, aktor-aktor eksternal yang keterlibatannya juga bernilai penting dalam *pa'totiboyongan* antara lain: masyarakat (luar) dan pemerintah daerah.

Praktik kelembagaan lokal *pa'totiboyongan* diwarnai oleh relasi kuasa para aktor, yang berbasis gender maupun kelas atau pelapisan sosial. *Pa'totiboyongan* yang merupakan seperangkat aturan, serta nilai-nilai yang mengatur tata kelola sumberdaya pertanian, khususnya lahan basah, adalah suatu kelembagaan yang dalam praktiknya melibatkan kepentingan beragam aktor. Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan para aktor itulah yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan atau relasi antarpihak yang bisa melahirkan konflik, perlawanan, maupun kolaborasi¹¹. Beragam orientasi kepentingan para aktor yang terlibat dalam praktik *pa'totiboyongan* dapat dilihat pada tabel berikut (*lihat* Tabel 1).

Tabel 1. Pemetaan Orientasi Kepentingan Aktor dalam Praktik *Pa'totiboyongan* di Desa Ballatumuka

Orientasi Kepentingan	Uraian	Aktor
Kepentingan ekonomi	Mengambil dan memperoleh manfaat dari adanya kegiatan pemanfaatan sumberdaya pertanian	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Majelis Gereja
Kepentingan ekologi/ lingkungan	Perlindungan dan pelestarian kondisi sumberdaya pertanian	<i>So'bok</i>
Kepentingan sosial-budaya	Penjagaan dan pelestarian budaya dan adat-istiadat serta tradisi dan kelembagaan lokal	<i>So'bok</i> , masyarakat, dan Pemerintah Desa

Seperti Mack *et al.* (1968) yang menganggap bahwa peran (*role*) merupakan "*the function of a status*", Parsons (1951) juga memandang bahwa peran-status adalah bangunan sistem sosial yang diatur oleh sistem norma, keyakinan dan nilai kultural. Sementara itu, Baker *et al.* (1991) memandang bahwa peran merupakan sumberdaya yang dapat dipakai untuk mendapatkan akses ke peran lain. Disini, kemampuan untuk memainkan satu peran membuat individu bisa mendapatkan akses ke peran lain yang memberikan penguatan positif (Outhwaite

11 Maring P, *Op.Cit.*, hlm. 1

2008). Seseorang dalam suatu struktur sosial dapat menjalankan beragam peran (Turner 2002), diantaranya: a). *Pre-assembled roles*, yakni peran yang sudah diketahui oleh semua orang; b). *Combinational roles*, yakni dua peran yang dikumpulkan dalam satu situasi; c). *Generalized roles*, yakni suatu sikap yang dapat diadopsi untuk peran lain dalam satu situasi; dan d). *Trans-situational roles*, yakni peran yang diasosiasikan dengan kategori sosial seseorang. Berikut adalah gambaran mengenai pemetaan peran dan orientasi kepentingan para aktor dalam praktik *pa'totiboyongan* di Ballatumuka. Pemetaan peran para aktor dalam praktik *pa'totiboyongan* di Ballatumuka dapat dilihat pada tabel berikut (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Pemetaan Peran Aktor dalam Praktik *Pa'totiboyongan* di Desa Ballatumuka

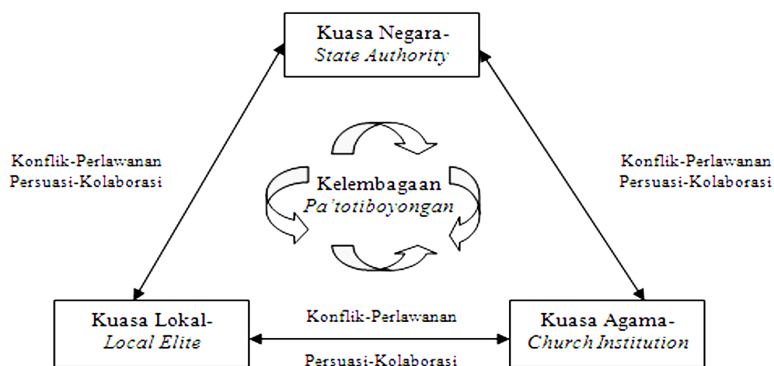
Orientasi Peran	Tipe Peran	Aktor
Pemimpin – Pelaksana Langsung	<i>Pre-assembled Roles, dan Combinational Roles</i>	<i>So'bok</i> dan Pemerintah Desa
Pelaksana Langsung	<i>Pre-assembled Roles, dan Trans-situational Roles</i>	<i>So'bok</i> , Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Majelis Gereja
Pendukung (Bukan Pelaksana)	<i>Pre-assembled Roles, dan Trans-situational Roles</i>	Pemerintah Daerah,

Relasi Kuasa dalam Praktik Kelembagaan *Pa'totiboyongan*

Kekuasaan terletak satu dimensi dengan relasi. Dimana ada relasi, disana pula ada kekuasaan. Dalam studi ini, kerangka teori kuasa Foucault digunakan sebagai alat analisis. Sejauh ini, kebanyakan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan sumberdaya alam lebih melihat bahwa kekuasaan pemerintah sebagai kekuasaan negara yang bekerja melalui penindasan dan represi tanpa melihat bahwa kekuasaan juga terdapat dalam masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Foucault mengenai kekuasaan. Kekuasaan dalam pandangan Foucault bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh satu pihak atau institusi tertentu saja. Kekuasaan muncul dari relasi-relasi yang terjalin antar berbagai kekuatan. Kekuasaan bagi Foucault adalah relasi yang terjalin antar subjek dan peran dari institusi-institusi yang menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat. Relasi yang di dalamnya terdapat sumbangan kekuatan dari masing-masing subjek inilah yang menunjukkan arti kekuasaan. Dalam pengertian

semacam ini, kekuasaan berarti bukanlah sesuatu yang hanya menjadi milik pemimpin atau pihak yang berpengaruh dalam masyarakat saja, melainkan lahir dari kekuatan-kekuatan atau *power* dan pemikiran dari setiap subjek. Dengan kata lain, kekuasaan ada dimana-mana dan setiap individu memiliki kekuasaan di dalam tubuhnya masing-masing. Adanya kekuatan atau *power* dari berbagai subjek, baik masyarakat biasa maupun pemimpin tidak dibatasi hanya dari para pemimpin saja. Hal ini dimediasi oleh adanya ruang-ruang komunikasi antar aktor.

Pada setiap praktik pengelolaan sumberdaya alam, terdapat dua mekanisme relasi antar aktor, yaitu: relasi formal dan/atau prosedural serta relasi informal (Nurhayati *et al.* 2013). Relasi formal dan/atau prosedural terjadi ketika terdapat aturan-aturan yang jelas dan transparan dalam berinteraksi, dan relasi ini biasanya terjalin dalam konteks kelembagaan formal. Sementara itu, relasi informal terjalin ketika terdapat ruang-ruang interaksi dalam suatu struktur sosial masyarakat yang tidak dapat 'dijangkau' oleh suatu aturan yang bentuknya formal dan struktural. Hal ini yang disebut oleh Nurhayati *et al.* (2013) sebagai keterbatasan dalam memfasilitasi dan menyelesaikan isu serta permasalahan dalam situasi *chaos* atau berkonflik karena sifatnya yang *rigid* dan prosedural. Di dalam praktik *pa'totiboyongan*, dua mekanisme relasi antar aktor seperti ini pula yang terjadi. Ketika relasi yang didasari oleh aturan-aturan formal dirasa kurang mampu mengatasi suatu keadaan atau kondisi tertentu, maka mekanisme relasi lainnya-lah yang 'bekerja'. Pada kasus pengelolaan sumberdaya pertanian berbasis kelembagaan lokal *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, relasi-relasi yang muncul diantara para aktor dapat digambarkan dalam bentuk segitiga kuasa, sebagai berikut.



Gambar 1. Segitiga Kuasa antar Aktor dalam Kelembagaan Pa'totiboyongan

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa di dalam bagan segitiga kuasa tersebut terdapat tiga aktor yang masing-masing memiliki kuasa tersendiri, yakni: kuasa negara yang diwakili oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, kuasa lokal yang terwakili oleh para elit desa (kepala desa dan aparatnya) beserta tokoh-tokoh adat, dan kuasa agama yang diwakili oleh para tokoh agama yang berkumpul dalam lembaga majelis gereja. Kuasa-kuasa yang dipetakan dalam Gambar 1 di atas merupakan tiga kuasa yang menjadi landasan kuat terbentuknya relasi kuasa antar aktor dalam praktik kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka.

Pola Relasi Kuasa dan Eksistensi Kelembagaan *Pa'totiboyongan*

Dinamika sistem pengelolaan sumberdaya alam senantiasa diwarnai oleh relasi kuasa yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas/masyarakat. Pada praktik *pa'totiboyongan* di Desa Ballatumuka, relasi kuasa antar aktor juga turut mewarnai praktik serta eksistensi kelembagaan tersebut. Di dalam praktik kelembagaan *pa'totiboyongan*, terdapat aktor-aktor yang memiliki peran dan orientasi kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan para aktor itulah yang disebut sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan atau relasi antarpihak. Relasi yang terjalin tersebut pada akhirnya dapat melahirkan konflik, perlawanan, dan kolaborasi.

Eksistensi praktik *pa'totiboyongan* yang mengatur pengelolaan sumberdaya pertanian di Ballatumuka tidak terlepas dari adanya beragam kepentingan dari para aktor. Adanya kepentingan para aktor yang berbeda tersebut, akhirnya akan berimplikasi pada adanya upaya dominasi terhadap aktor lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menegaskan peran dan kepentingan masing-masing aktor terhadap pengelolaan sumberdaya pertanian di Ballatumuka. Di sisi lain, keterbukaan Ballatumuka pada 'dunia luar' melalui penetapan desa tersebut sebagai wilayah wisata menjadikan praktik-praktik atau kelembagaan lokal menjadi sesuatu yang 'terancam' keberlangsungan atau eksistensinya. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong para aktor untuk melancarkan beragam strategi dengan membangun jejaring kuasa demi mewujudkan kepentingan-kepentingannya.

Adanya modernisasi di bidang pertanian juga mempengaruhi dinamika eksistensi praktik kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka. Selain itu, masuknya agama (dalam hal ini agama Kristen)

untuk menggantikan agama atau kepercayaan tradisional yang dahulunya dianut oleh masyarakat Mamasa juga menjadi faktor lain yang mendorong adanya penyesuaian-penyeseuain tertentu antara ajaran agama dengan kepercayaan terhadap ritual-ritual atau tradisi-tradisi lama yang dijalankan. Tergantikannya kepemimpinan adat dengan masuknya aturan-aturan formal pemerintahan yang modern juga mempengaruhi dinamika segala ritual atau tradisi adat yang sejak zaman nenek moyang sudah dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Mamasa, termasuk praktik *pa'totiboyongan*.

Relasi kuasa menggambarkan pola-pola hubungan antar aktor yang terlibat di dalam pengelolaan sumberdaya pertanian - lahan basah berbasis kelembagaan *pa'totiboyongan*. Hubungan atau relasi kekuasaan antar aktor dalam berbagai arena memiliki pola atau formulasi tertentu, diantaranya:

1. Nuansa hubungan kekuasaan yang memperlihatkan kelihaihan dan kecerdikan salah satu pihak yang berusaha mewujudkan tujuannya melalui strategi, mekanisme, dan taktik yang persuasif, sehingga pihak yang dipengaruhi menerima tujuan pihak tersebut;
2. Nuansa hubungan kekuasaan yang memperlihatkan salah satu pihak berusaha mewujudkan tujuannya melalui legitimasi otoritas yang disandangnya dan menghasilkan hubungan bernuansa konflik;
3. Nuansa hubungan kekuasaan yang memperlihatkan bahwa masing-masing pihak berkonsentrasi pada pencapaian tujuan masing-masing dan menghasilkan hubungan bernuansa perlawanan;
4. Nuansa hubungan kekuasaan yang memperlihatkan tumbuhnya kesadaran bersama yang melihat kekuasaan sebagai sebuah kompleks strategi yang ada pada semua pihak, sehingga usaha mewujudkan kekuasaan harus ditempuh melalui proses membangun kolaborasi.

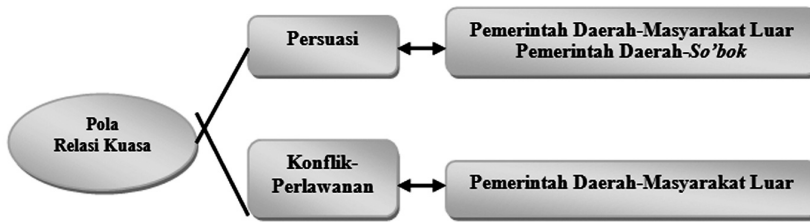
Pada praktik pengelolaan sumberdaya pertanian - lahan basah berbasis kelembagaan lokal *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, ditemukan pola-pola relasi seperti tersebut di atas. Relasi-relasi kuasa yang muncul dalam praktik kelembagaan *pa'totiboyongan* diwarnai oleh nuansa-nuansa relasi kuasa berupa konflik, perlawanan, persuasi, maupun kolaborasi. Pola relasi kuasa tersebut bekerja dalam ruang-ruang kepentingan para aktor.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di dalam praktik pengelolaan sumberdaya pertanian berbasis kelembagaan lokal *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, terdapat dua aktor utama yang berperan penting yaitu: aktor internal dan aktor eksternal. Aktor-aktor internal tersebut antara lain: masyarakat adat Ballatumuka, *so'bok* sebagai imam padi atau pemimpin pelaksanaan *pa'totiboyongan*, Kepala Desa Ballatumuka beserta aparat pemerintahan desa lainnya, serta majelis gereja sebagai perwakilan dari kelembagaan agama. Sementara itu, aktor-aktor eksternal yang keterlibatannya juga bernilai penting dalam *pa'totiboyongan* antara lain: masyarakat (luar) dan pemerintah daerah. Jika ditelaah dengan menggunakan kerangka atau pola-pola relasi kuasa Maring (2010), maka pada kasus relasi kuasa antar aktor internal yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, pola atau nuansa hubungan kekuasaan yang nampak adalah hubungan bernuansa persuasi, konflik, dan kolaborasi. Gambaran mengenai pola relasi kuasa yang tercipta dalam praktik *pa'totiboyongan* di Ballatumuka dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 2. Pola Relasi Kuasa Aktor Internal dalam Praktik Kelembagaan *Pa'totiboyongan* di Ballatumuka

Sementara itu, pola-pola relasi yang tampak pada hubungan antar aktor eksternal dalam praktik kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka adalah pola relasi yang bernuansa persuasi, konflik, perlawanan, hingga kolaborasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut (*lihat Gambar 3*).



Gambar 3. Pola Relasi Kuasa Aktor Eksternal dalam Praktik Kelembagaan *Pa'totiboyongan* di Ballatumuka

Beragam pola relasi yang tampak dalam interaksi/hubungan antar aktor dalam kaitannya dengan pelaksanaan kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, pada akhirnya akan memberikan pengaruh tertentu terhadap eksistensi kelembagaan tersebut. Sementara itu, adanya modernisasi di bidang pertanian, serta keterbukaan wilayah terhadap dunia luar, sejauh ini mempengaruhi dinamika praktik dan eksistensi kelembagaan *pa'totiboyongan* di Mamasa. Hal ini tampak dari adanya wilayah-wilayah desa di Mamasa yang sudah semakin meninggalkan aturan-aturan atau nilai-nilai adat dalam *pa'totiboyongan*. Di beberapa desa bahkan *so'bok* dan *pa'totiboyongan* dianggap hanya sebatas simbol warisan budaya saja.

Desa Ballatumuka merupakan satu wilayah yang secara geografis terletak di perbukitan dengan jarak terjauh dari ibukota Kecamatan Balla. Letaknya yang terpencil serta sulitnya akses menuju desa tersebut tidak menjadikan masyarakat di desa ini menjadi masyarakat yang tertutup dari dunia luar. Keterbukaan ini tampak dari banyaknya kunjungan masyarakat luar, yang kebanyakan berasal dari luar daerah bahkan luar negeri (sebagai wisatawan)¹². Selain itu, keterbukaan masyarakat juga terlihat dari adanya ketertarikan masyarakat akan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi baru, salah satunya teknologi di bidang pertanian. Penerimaan masyarakat akan hal-hal baru berkaitan dengan pengelolaan pertanian di satu sisi bernilai positif yaitu meningkatnya keefisienan kegiatan pertanian. Sementara itu, di sisi lainnya, nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional masyarakat juga lambat laun mulai 'terkikis' dengan masuknya modernisasi di bidang pertanian. 'Ancaman' terhadap eksistensi kelembagaan *pa'totiboyongan* berasal dari relasi-relasi kuasa yang bekerja pada level internal maupun eksternal. Relasi kuasa yang mewujud dalam pola relasi bernuansa

12 Pada tahun 2010, Desa Ballatumuka ditetapkan sebagai desa wisata yang menawarkan keindahan panorama alam serta wisata budaya. Rumah-rumah adat yang masih dipertahankan sebagai rumah huni masyarakat hingga saat ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

konflik dan perlawanan-lah yang menjadi ‘ancaman’ terbesar terhadap eksistensi kelembagaan lokal *pa’totiboyongan*.

Pola relasi kuasa yang menjadi ancaman tersendiri bagi keberadaan atau eksistensi kelembagaan *pa’totiboyongan* di Ballatumuka adalah relasi-relasi antar aktor yang bernuansa konflik dan perlawanan. Untuk lebih jelasnya, uraian mengenai pengaruh pola relasi kuasa antar aktor terhadap eksistensi kelembagaan *pa’totiboyongan* dapat dilihat pada tabel berikut (*lihat* Tabel 3).

Tabel 3. Pengaruh Pola Relasi Kuasa terhadap Eksistensi Kelembagaan *Pa’totiboyongan* di Desa Ballatumuka

Relasi Kuasa		Pola Relasi	Pengaruh terhadap Eksistensi <i>Pa’totiboyongan</i>
Relasi Internal	Tokoh Adat-Masyarakat	Persuasi	Dukungan terhadap eksistensi <i>pa’totiboyongan</i> Penguatan kelembagaan <i>pa’totiboyongan</i>
	Pemerintah Desa-Masyarakat		Pengakuan terhadap nilai-nilai adat dan tata aturan dalam <i>pa’totiboyongan</i>
	Tokoh Adat-Pemerintah Desa		Dinamika praktik <i>pa’totiboyongan</i> pada awal kemunculan pemerintahan formal Kerjasama atau koordinasi dalam mempertahankan kelembagaan adat dan melaksanakan aturan formal
	Pemerintah Desa-Majelis Gereja	Konflik	‘Ancaman’ terhadap ‘terkikisnya’ nilai-nilai asli dalam kelembagaan <i>pa’totiboyongan</i>
	Pemerintah Desa-Masyarakat		
	<i>So’bok</i> -Pemerintah Desa	Kolaborasi	Koordinasi dalam pelaksanaan dan adanya penguatan kelembagaan <i>pa’totiboyongan</i>
	<i>So’bok</i> -Majelis Gereja		
	<i>So’bok</i> -Masyarakat		

Relasi Eksternal	Pemerintah Daerah-Masyarakat Luar	Persuasi	Pengakuan terhadap nilai-nilai adat dan tata aturan dalam <i>pa'totiboyongan</i>
	Pemerintah Daerah- <i>So'bok</i>		
	Pemerintah Daerah-Masyarakat Luar	Konflik-Perlawanan	'Ancaman' terhadap 'terkikisnya' nilai-nilai asli dalam kelembagaan <i>pa'totiboyongan</i>

Penutup

Pengelolaan sumberdaya pertanian berbasis kelembagaan lokal seperti praktik *pa'totiboyongan* di Desa Ballatumuka, Kabupaten Mamasa, melibatkan beragam aktor serta dimensi-dimensi yang luas yakni ekonomi, sejarah, sosial, dan budaya. Pada dimensi-dimensi tersebut melekat pula simbol-simbol atau perangkat kuasa masing-masing aktor yang saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu relasi yang disebut relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan yang dimaksud bersifat dinamis dan bergerak atas dasar peranan serta kepentingan para aktor. Peranan dan kepentingan para aktor akan tampak dalam strategi-strategi yang dimainkan dalam dinamika relasi kuasa tersebut. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil studi ini. Beberapa kesimpulan tersebut antara lain:

1. Relasi kuasa antar aktor yang terlibat dalam praktik kelembagaan *pa'totiboyongan* di Desa Ballatumuka, Kabupaten Mamasa, didorong dan didasari oleh adanya beragam peranan dan kepentingan para aktor tersebut. Baik aktor internal maupun eksternal, memiliki tiga kepentingan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi, ekologi/lingkungan, serta sosial-budaya.
2. Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, dan Majelis Gereja merupakan aktor yang memiliki orientasi kepentingan ekonomi. Sementara itu, *so'bok* merupakan aktor yang berorientasi pada kepentingan ekologi/lingkungan. Aktor yang memiliki orientasi pada kepentingan sosial-budaya adalah *so'bok*, masyarakat, dan pemerintah desa.
3. Peran yang menjadi dasar bagi relasi kuasa antar aktor dalam kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka, beragam mulai dari peran sebagai pemimpin – pelaksana langsung, pelaksana langsung, dan pendukung (bukan pelaksana). *So'bok* dan

pemerintah desa menjalankan peranannya sebagai pemimpin – pelaksana langsung dalam praktik *pa'totiboyongan*, sedangkan masyarakat majelis gereja merupakan aktor yang menjalankan peranannya sebagai aktor pelaksana langsung *pa'totiboyongan*. Sementara itu, pemerintah daerah adalah aktor yang menjalankan peranan sebagai pendukung yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan *pa'totiboyongan*.

4. Pada praktik pengelolaan sumberdaya pertanian – lahan basah berbasis kelembagaan lokal *pa'totiboyongan* diwarnai oleh nuansa-nuansa relasi kuasa berupa persuasi, konflik, perlawanan dan kolaborasi. Relasi kuasa diantara aktor internal yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kelembagaan *pa'totiboyongan* di Ballatumuka diwarnai oleh pola relasi yang bernuansa persuasi, konflik, dan kolaborasi. Selanjutnya, relasi kuasa yang tampak pada hubungan diantara aktor eksternal adalah pola relasi yang bernuansa persuasi, konflik – perlawanan, dan kolaborasi. Pola relasi kuasa bernuansa persuasi dan kolaborasi berpengaruh pada terciptanya dukungan dan penguatan pada nilai-nilai adat dan budaya dalam praktik *pa'totiboyongan*. Sebaliknya, pola relasi kuasa bernuansa konflik – perlawanan berpengaruh pada adanya 'ancaman' terhadap pengikisan nilai-nilai adat/ lokal *genuine* yang ada pada kelembagaan *pa'totiboyongan*.

Daftar Bacaan

- Buijs K. 2009. *Kuasa Berkat dari Belantara dan Langit: Struktur dan Transformasi Agama Orang Toraja di Mamasa Sulawesi Barat*. Mamasa-Jakarta (ID): Penerbit Ininnawa dan KITLV.
- Fauzi M. 2008. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia: Analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Foucault M. 2002. *Kuasa/Pengetahuan*. Yudi S, penerjemah. Yogyakarta (ID): Bentang Budaya. Terjemahan dari: *Power/Knowledge*.
- Herliana L. 2004. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Dekomposisi Sistem Neraca Sosial Ekonomi [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Hitipeuw J. 2011. *Indonesia The World's Second Mega Biodiversity Country*. KOMPAS.com 2011 [Internet]. [diunduh 2014 Agust 27]. Tersedia pada: <http://english.kompas.com/read/2011/05/16/0725522/Indonesia.The.Worlds.Second.Mega.Biodiversity.Country>.

- Mack RW, Young K. 1968. *Sociology and Social Life*. New York (US): Van Nostrand Reinhold Company.
- Maring P. 2010. *Bagaimana Kekuasaan Bekerja Dibalik Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi? Sebuah Sudut Pandang Antropologi tentang Perebutan Sumberdaya Ekologi*. Bekasi (ID): Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia.
- Mony A. 2015. *Ekologi Politik Sasi Laut: Relasi Kuasa Pengelolaan Wilayah Pesisir* [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Muljono P. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bogor: IPB Press.
- Nurhayati YR, Suhirman. 2013. *Dinamika Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Tasikmalaya)*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 2013 [Internet]. [diunduh 2014 Des 28]; BSAPPK, V2N3. Tersedia pada: <http://sappk.itb.ac.id/jpwwk2/wp-content/uploads/2013/11/V2N3-Dinamika-Kelembagaan-Pengelolaan-Sumber-Daya-Alam-Dalam-Konteks-Pembangunan-Berkelanjutan.pdf>
- Outhwaite W. 2008. *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*. Wibowo BS, penerjemah. Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group. Terjemahan dari: *The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought*.
- Parsons T. 1951. *The Social System*. Glencoe (IL): Free Press; London (UK): Routledge and Kegan Paul.
- Sjaf S, Asma L, Retno PA. 2007. *Potret Kedaulatan Pangan Mamasa*. Bogor (ID): SAINS (Sajogyo Institute).
- Turner JH. 2002. *Face to Face: a Sociological Theory of Interpersonal Behaviour*. Stanford (CA): Stanford University Press.
- Wahab MT. 2010. *Relasi Kuasa dalam Konservasi: Respon Masyarakat Pinggir Hutan terhadap Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak* [tesis]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.

